KERUSUHAN ANTI-CINA DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 1967

Retno Winarni[*)] dan Bambang Samsu Badriyanto[*)]

Abstract

Anti-Chinese riots in Situbondo in 1967 was a series of anti-Chinese riots that occurred in other places. The results of this study indicate that the factors leading to the riot were the heat of national politics at that time which allowed the mass easily do anarchy and the objective conditions in the area where the riots occurred. In conclusion, the anti-Chinese riots in Situbondo was not caused by a lack of harmonious relations between the Chinese people with the natives, but by political factor and economic gap between Chinese and indigenous people.

***Keywords**:* Chinese people, indigenous people, riot, national politics.

Abstrak

Kerusuhan anti Cina di Kabupaten situbondo yang terjadi pada tahun 1967 merupakan rentetan dari kerusuhan anti Cina yang terjadi di tempat lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan yaitu politik nasional pada waktu itu yang memudahkan massa terpicu untuk berbuat anarkis, disamping kondisi obyektif di daerah di mana kerusuhan terjadi memenuhi kriteria untuk dijadikan sasaran amuk massa. Jadi kesimpulannya, bahwa kerusuhan anti Cina di Kabupaten Situbondo bukan disebabkan hubungan yang kurang harmonis antara orang-orang Cina dengan pribumi, tetapi oleh fator politik dan kesenjangan ekonomi antara orang Cina dengan pribumi.

Kata Kunci: masyarakat Cina, masyarakat bumiputra, kerusuhan, politik nasional

PENGANTAR

Indonesia ialah suatu bangsa yang terdiri dari masyarakat yang beraneka ragam, dengan keinginan bersama menyatukan diri dalam suatu bangsa, bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika (satu di dalam keanekaragaman). Berjuta-juta manusia hidup di seluruh kawasan Nusantara, terdiri dari berbagai kesatuan kelompok suku dan masing-masing memiliki konfigurasi budaya yang berbeda. Bersama India dan Cina, Indonesia adalah termasuk negara yang terbanyak mempunyai suku bangsa. Keanekaragaman ini semakin bertambah ketika arus imigran orang asing mulai mengalir memasuki Indonesia dan kemudian menetap. Orang-orang asing tersebut antara lain berasal dari Cina, India, Arab, dan Eropa. Mereka datang ke

[*)] Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember. E-mail: retnowinarni122@yahoo.com
[**)] Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember. E-mail: bambangsamsu@gmail.com

Indonesia dengan membawa serta latar belakang kehidupan dan adat istiadat, dan budayanya. Pendatang yang paling banyak jumlahnya adalah orang-orang Cina.

Datang dan menetapnya suatu ras pada ras lain dengan membawa serta adat istiadat, agama, dan prinsip hidup yang berbeda, dapat mencetuskan masalah rasial apabila perbedaan yang dimiliki semakin lama semakin nyata dan ras pendatang enggan membaur. Seperti yang terjadi di Indonesia, dari sekian banyak orang asing yang datang dan menetap di Indonesia, ternyata hanya pada orang-orang Cina tercatat paling sering terjadi peristiwa-peristiwa rasialis.

Masalah yang timbul antara kelompok pribumi dan nonpribumi keturunan Cina ini cukup serius, terbukti dengan adanya sejumlah tindakan kekerasan, bentrokan fisik, serta serangkaian tindakan ekstrem lainnya. Peristiwa-peristiwa tersebut sering tidak rasional. Contohnya pada penghujung tahun 1996, lantaran tidak dapat menonton konsernya Iwan Fals, sebagian lagi bilang gara-gara penyanyi idola kaum muda itu hanya membawakan beberapa lagu saja, sekerumunan remaja mengamuk. Mereka melempari toko milik orang-orang Cina yang ada di Bandung Jawa Barat. Penguasa militer setempat pun bertindak. Media massa tidak boleh menuliskannya (Zein, 2000:8)

Kerusuhan anti-Cina di Indonesia bukan merupakan hal baru. Sebelum tahun 1967 telah terjadi berkali-kali perist gerakan anti-Cina. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat disebutkan misalnya gerakan anti-Cina yang terjadi pada masa-masa sekitar pendirian Sarekat Dagang Islam (SDI) tahun 1911, sebagai akibat munculnya gerakan-gerakan di antara golongan pribumi untuk menandingi penguasaan ekonomi oleh orang-orang Cina di Indonesia. Kemudian gerakan anti-Cina yang timbul di beberapa tempat pada masa revolusi, sebagai akibat dari adanya kesan di antara kelompok pribumi bahwa seolah-olah golongan Cina telah ikut membantu penjajah Belanda. Selanjutnya 10 Mei 1963 di Jawa Barat, yang merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi di beberapa kota, dimulai dari kota Cirebon, menjalar ke kota-kota lain di Jawa Barat, Jawa Timur, dan berakhir di Yogyakarta pada tanggal 21-22 Mei 1963 (Judohusodo, 1985:42).

Kerusuhan anti-Cina ternyata berlanjut. Antara bulan Oktober dan Desember tahun 1965, kerusuhan terparah terjadi di Makassar dan Medan, dan dalam tiap-tiap kasus kekerasan itu berkaitan dengan demonstrasi ke Konsulat Cina. Di Makassar demonstrasi anti-Cina pada tanggal 10 November 1965 diselenggarakan oleh organisasi mahasiswa dan pemuda Islam HMI dan GP Ansor. Sasaran demonstrasi ditujukan kepada gedung dan bangunan milik orang Cina lainnya (Coppel, 1994: 127).

Kerusuhan anti-Cina sempat menimbulkan krisis serius di Jawa Timur. Pada bulan April 1967 huru-hara anti-Cina terjadi di kota Situbondo, Panarukan dan Besuki. Sejumlah besar pemuda Indonesia, yang dipimpin oleh para anggota front aksi, membakar sebuah pabrik milik orang Cina. Mereka menjarah toko dan rumah, melemparkan perabotan rumah dan kendaraan ke api unggun. Setiap orang Cina yang mereka temui apa pun kewarganegaraannya, dipukuli,

termasuk beberapa orang yang ditembak oleh barisan pengawal di Situbondo pada tanggal 6 April 1967 (Coppel, 1994:202).

Memperhatihan fenomena ini, dapat dikatakan bahwa masalah hubungan antara orang Cina dengan pribumi merupakan isu sensitif. Hal ini dapat dilihat dari penyebab meletusnya kerusuhan yang tampak sepele, masyarakat terutama kaum mudanya begitu mudah dibangkitkan oleh rasa sentimen terhadap orang-orang Cina. Dampak kerusuhan-kerusuhan tersebut adalah kerugian secara material yang cukup besar dengan hancurnya toko-toko, pabrik-pabrik, dan harta benda milik orang Cina. Namun di atas segala kerugian tersebut, yang paling sulit dicari penggantinya adalah retaknya hubungan pribumi dengan non pribumi (orang Cina), karena akan mempertautkan hubungan tersebut seperti semula, atau bahkan meningkatkan ke arah yang lebih baik akan memakan waktu yang lebih lama lagi (Judohusodo, 1985: 42).

Konflik rasial secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kualitas kehidupan manusia dalam berbagai dimensinya seperti kondisi politik, relasi sosial antarindividu, dan dimensi ekonomi. Kerusuhan dan konflik rasial tidak hanya berdampak pada menurunnya stabilitas politik dan keamanan, serta memburuknya hubungan antar etnis, tetapi akan berdampak pada kerugian ekonomi yang besar karena rusaknya pusat-pusat kegiatan ekonomi, yang akhirnya mengurangi terserapnya tenaga kerja. Jadi, konflik rasial tidak mempunyai konsekuensi berupa resiko ekonomi semata, melainkan juga menyertakan ongkos sosial yang tidak kalah mahalnya.

Kabupaten Situbondo memberikan kasus menarik dalam kaitannya dengan kerusuhan rasial dan berbagai konsekuensinya. Hal ini didasari oleh alasan bahwa sejak abad ke-19 kabupaten ini mengalami berbagai transformasi, dari wilayah yang jarang penduduknya menjadi wilayah yang padat penduduknya. Mempunyai penduduk Madura yang cukup besar dan penduduk Islam kuat lainnya, kemudian juga etnis lain yaitu Arab dan Cina, sehingga Situbondo juga merupakan ilustrasi yang baik untuk wilayah yang dihuni oleh berbagai etnis. Hubungan antaretnis ini mengalami pasang surut, indikasinya adalah terjadinya kerusuhan anti Cina sampai dua kali yaitu tahun 1967 dan tahun 1998. Secara garis besar artikel ini membahas tentang: (1)Faktor-faktor apa yang menjelaskan terjadinya kerusuhan anti Cina di Situbondo? (2)Bagaimana kerusuhan anti Cina tersebut terjadi ? (3) Bagaimanakah dampak kerusuhan anti Cina terhadap masyarakat pribumi dan orang-orang Cina sendiri?

SEKILAS KABUPATEN SITUBONDO

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang berada di kawasan Timur Pulau Jawa atau yang lebih dikenal dengan sebutan daerah Tapal Kuda. Posisinya berada diantara 7° 35'-7° 44' Lintang Selatan dan 113° 30-114° 42' Bujur Timur. Letak Kabupaten Situbondo di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo (Yasin, 2003: 15; Bapedda

dan Kantor Statistik Situbondo, 1990:1)

Luas kabupaten Situbondo adalah 1.638.50 km^2 atau 163.850 Ha. Bentuk wilayahnya memanjang dari arah Barat ke Timur berbatasan dengan Pantai Utara sepanjang 140 km. Pantai Utara umumnya berdataran rendah sedangkan di sebelah Selatan berdataran tinggi dengan rata-rata lebar wilayah lebih kurang 11 Km. Kabupaten Situbondo terdiri atas 4 wilayah kerja pembantu bupati, 17 wilayah kecamatan, 4 wilayah perwakilan kecamatan, 4 kelurahan, 132 desa dan 640 dusun. Dari 17 kecamatan yang ada, semuanya memiliki garis pantai kecuali 3 kecamatan yaitu kecamatan Sumbermalang, Jatibanteng dan Kecamatan Panji (Yasin, 2003: 15)

Penduduk mayoritas di Situbondo adalah Madura di samping penduduk Jawa dan Using. Ketiga kelompok penduduk Situbondo ini masing-masing membentuk suatu daerah kebudayaan di daerah itu. Orang-orang Madura memiliki ciri-ciri budaya yang secara mendalam dipengaruhi oleh tradisi Islam. Mereka telah diketahui oleh kepatuhan mereka yang kuat pada perintah-perintah agama. Masjid adalah pusat dari kehidupan sosial mereka dan pemimpin agama mereka (ulama) memiliki posisi tertinggi di masyarakat. Tidak seperti orang-orang Madura, orang-orang Using dianggap sebagai subetnik Jawa. Dalam istilah bahasa, secara mendasar bukan perbedaan fundamental antara etnik Jawa dan Using, kecuali fakta bahwa masing-masing berbicara satu dialek. Meskipun demikian, Jawa dan Using juga memiliki ciri-ciri perbedaan kultural. Etnik lain yang dianggap sebagai minoritas adalah orang-orang Cina, Arab, dan etnik lain.

Sebagai masyarakat multietnik, hubungan sosial antara kelompok etnik di Situbondo tidak lengkap tanpa adanya konflik. Masalah etnis meskipun demikian tidak kelihatan menjadi akar dari kebanyakan perselisihan sosial. Konflik sering dihubungkan dengan pemerasan/penghisapan, penganiayaan, dan isu-isu kepemilikan tanah. Kelompok minoritas telah sering menjadi target pembunuhan. Orang-orang Cina sering dituduh dengan penganiayaan. Sementara kekayaan keluarga dari minoritas sering menciptakan kecemburuan pada waktu terjadi konflik. Sampai Indonesia merdeka pada bulan Agustus 1945, skala terbesar ledakan konflik etnik terjadi di daerah ini pada tahun 1967, di mana orang-orang Cina menjadi korban kekerasan (Nawiyanto, 1999:32).

Sektor ekonomi Kabupaten Situbondo hingga tahun 1967 masih didominasi oleh sektor pertanian. Hal tersebut dipengaruhi oleh potensi ekonomi daerah yang tetap bercorak agraris. Sektor pertanian merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh masyarakat pedesaan Situbondo, yaitu sekitar 75 % dari total angkatan kerja. Pada kenyataannya, sektor pertanian telah memberi kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Situbondo. Dominannya sektor pertanian sangatlah ditentukan oleh peranan subsektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan laut serta kehutanan (Yasin, 2003:22; Pemda Situbondo, 1991:3). Sisanya adalah berkecimpung dalam sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan perikanan.

LATAR BELAKANG KERUSUHAN ANTI-CINA DI KABUPATEN SITUBONDO

Kondisi Politik Nasional Menjelang Terjadinya Kerusuhan

Keterlibatan orang Cina dalam politik Indonesia bermula sejak sebelum Perang Dunia II. Elite peranakan Cina terpecah dalam orientasi politik mereka. Ada yang berkiblat ke Cina (group *Sin Po*), ada yang berorientasi ke Belanda (*Chung Hwa Hui*) dan ada juga yang berkiblat ke Indonesia (Partai Tionghoa Indonesia) (Suryadinata, 2002: 91). Setelah Indonesia merdeka, terutama zaman demokrasi parlementer, sebuah partai orang-orang Cina yang berkiblat pada konsep integrasi, Partai Demokrasi Tionghoa Indonesia (PDTI) muncul, walaupun pendek umurnya. Partai tersebut tidak dapat bertahan menghadapi tumbuhnya kecenderungan untuk berbaur di kalangan peranakan, sikap umum yang apatis terhadap masalah politik dan sosial, serta ketidak-acuhan golongan totok. Para penganut konsep pembauran mendorong orang Cina WNI untuk bergabung dengan berbagai partai yang didominasi pribumi dan tidak menjadi elite yang secara rasial, ekonomis dan kultural berbeda. Pada masa demokrasi parlementer ada beberapa orang Cina yang menjadi anggota parlemen dan menteri. Akan tetapi, dengan adanya gejala disintegrasi dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi Indonesia menjelang akhir tahun 1950-an kemenangan-kemenangan di parlemen, kemajuan ekonomi pada umumnya, dan perpecahan yang semakin besar di antara orang-orang totok yang tidak mau berpartisipasi, golongan peranakan integrasionis, dan saingannya kaum penganut pembauran, tampak kecil dibandingkan dengan ancaman hebat terhadap kehadiran orang Cina di Indonesia. Nasionalisasi perusahaan milik Belanda, pengusiran orang Cina dari daerah pedalaman, perundingan yang berlarut-larut mengenai dwikewarnegaraan dengan RRC, dan isu-isu lainnya yang membuat hari depan orang Cina di Indonesia tidak menentu (Greif, 2002: 14). Dalam suasana seperti inilah lahir Baperki.

Baperki merupakan organisasi yang terbuka untuk semua orang Indonesia tanpa memandang ras, dan tujuannya ialah untuk memilih dan mendukung calon-calon dalam partai-partai politik nonetnis dan nonrelegius, serta untuk memperjuangkan perlakuan yang sama terhadap semua WNI (Zein, 2000: 11-12). Pada mulanya Baperki tidak menganut sesuatu ideologi dan pada dasarnya integrasionis, menginginkan agar golongan Cina menjadi sebuah suku bangsa di samping suku-suku bangsa Indonesia lainnya yang sudah ada. Pada mulanya Baperki menguntungkan, akan tetapi tidak lama kemudian ia larut ke dalam kemelut politik Indonesia. Setelah pemilihan umum tahun 1955 dan krisis tahun 1957-1959, di bawah ketuanya Siaw Giok Tjhan yang pro-Komunis, organisasi ini bergeser ke kiri. Hal ini menyebabkan nama Baperki merosot di mata banyak orang. Setelah sukses PKI yang mengejutkan dalam Pemilihan Umum tahun 1955 dan sikap simpatinya terhadap orang-orang keturunan Cina yang dinyatakan dengan terang-terangan, aktivitas Baperki menjadi makin sejajar dengan aktivitas PKI. Akibatnya sentimen

orang-orang pribumi yang anti-Komunis dan anti-Cina makin besar. Mulai saat itulah komunisme diasosiasikan dengan Cina (Greif, 2002:15).

Arah gerakan Baperki yang mulai condong ke kiri ini bersamaan dengan ketidakstabilan politik nasional pada waktu itu. Konstelasi politik yang semakin karut marut memberikan kesempatan pada pihak militer untuk berperan yang lebih besar dalam panggung perpolitikan Indonesia. Naiknya militer ke panggung politik ini berawal dari serangkaian kudeta oleh para komandan militer setempat di beberapa daerah Sumatra dan Indonesia Timur pada akhir tahun 1956 dan awal tahun 1957, ketika Soekarno mengumumkan negara dalam keadaan bahaya berdasarkan kekuasaan Undang-Undang Darurat Perang. Sebagai akibatnya, Angkatan Darat mendapat kekuasaan administratif yang luas dan kekuasaan politik. Sejak itu kelompok ini mengembangkan serangkaian doktrin-doktrin yang dapat membenarkan suatu peranan bagi golongan militer, walaupun Undang-Undang Darurat sudah dicabut. Menurut doktrin jalan tengah yang diucapkan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Nasution pada bulan November 1958, bahwa militer mempunyai hak untuk ikut serta dalam tingkatan tertinggi pemerintahan. Tentara juga menuntut status sebagai golongan fungsional dengan hak diwakili dalam badan-badan permusyawaratan yang ditunjuk berdasarkan UUD 1945 (Karim, 1989: 29). Di samping peranan politiknya yang berkembang, AD sekaligus memperoleh pijakan penting di bidang perekonomian, ketika pada bulan Desember 1957, jaringan luas perusahaan Belanda di daerah-daerah diambil alih oleh tindakan liar Serikat Buruh setempat dengan mengabaikan Instruksi Kabinet. Dorongan tidak langsung dari Soekarn, membuat Nasution mengambil prakarsa untuk mengembalikan pengendalian kekuasaan pada Pusat dengan memerintahkan agar perusahaan-perusahaan tersebut ditempatkan di bawah pengawasan tentara (Coppel, 1994: 73)

Pascakudeta yang gagal, atau tepatnya pada masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, drama politik memasuki tahap kritisnya dalam sepuluh minggu pertama tahun 1966. Mula-mula prakarsa berada di tangan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). KAMI yang dibentuk pada bulan Oktober 1965, baru mulai menjadi pusat perhatian dalam bulan Februari 1966 ketika organisasi ini mulai melancarkan serangkaian demonstrasi di Jakarta, yang mengajukan tiga tuntutan (Tritura) kepada Presiden. Tuntutan itu ialah supaya PKI dilarang, Kabinet diganti, dan harga-harga diturunkan. Kampanye memperoleh kemajuan pesat pada tahap ini terutama karena pemerintah baru saja mengumumkan kenaikan drastis harga berbagai bahan kebutuhan pokok, transportasi, dan tarip pos. Sukarno dan Subandrio mencoba mengimbangi pengaruh KAMI dengan menyerukan dibentuknya Barisan Sukarno dan Perhimpunan Mahasiswa Nasional yang akan mencakup semua kelompok mahasiswa. Hal ini mengumandangkan serangan balasan besar oleh Presiden yang mencapai puncaknya pada tanggal 21 Februari dengan pengumuman tentang penyempurnaan Kabinet Dwikora. Komposisi kabinet ini merupakan

tamparan kepada KAMI. Beberapa di antara menteri yang paling banyak mendapat kecaman dalam bulan-bulan terakhir (termasuk Oei Tjoe Tat dari Baperki) dipertahankan, sedangkan Jendral Nasution dipecat dari kabinet. KAMI dilarang, tetapi demonstrasi-demonstrasi dilanjutkan oleh Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI). Demonstrasi ini mencakup serangan lebih lanjut terhadap kantor Berita Cina baru, Konsulat Jenderal Cina dan kantor perwakilan dagangnya pada tanggal 9 dan 10 Maret 1966. Sekalipun Sukarno melakukan langkah-langkah terakhir pada hari berikutnya ketika ia membujuk para pemimpin partai politik untuk mengutuk demonstrasi-demonstrasi mahasiswa, pada tangal 11 Maret pemimpin-pemimpin Angkatan Darat mengajukan ultimatum kepada Presiden, sehingga dengan perasaan terpaksa diterimanya juga. Berkenaan dengan itu ia menandatangani Surat Perintah 11 Maret yang melimpahkan kekuasaan kepada Jenderal Suharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi (Coppel, 1995:130-131)

Kambing hitam utama telah dicopot dari jabatanya dan ditempatkan dalam tahanan, tetapi inflasi masih terus berlanjut. Tentu saja orang dapat menuntut agar mereka diajukan ke pengadilan, tetapi suatu kecenderungan yang wajar adalah mencari kambing hitam lain. Di samping itu, kesatuan-kesatuan aksi (terutama KAPPI) mungkin merasakan perlunya suatu pokok persoalan yang baru supaya para anggotanya dimobilisasi dan dengan demikian mempertahankan daya gerak yang telah mereka capai dalam hari-hari penuh ketegangan sebelum tanggal 11 Maret. Cina cocok sekali untuk keperluan ini. Mereka dengan mudah dapat dipercaya sebagai wakil ancaman komunis, *kolone* kelima, dan penyabot ekonomi. Lagipula, ada keuntungan tambahan bahwa mereka merupakan sasaran yang relatif tidak punya pertahanan. Suatu serangan frontal terhadap Presiden masih merupakan urusan yang mengandung risiko, tetapi golongan Cina tidak mempunyai sarana perlindungan yang kelihatan. Karena alasan itulah, munculnya kekhawatiran orang Cina itu sendiri ketika tempo serangan terhadap gedung-gedung diplomatik dan konsuler Cina ditingkatkan, sekolah-sekolah Cina dirampas dan ditutup, dan masalah hubungan dengan Cina serta kedudukan orang Cina Indonesia sendiri menarik perhatian yang semakin besar di arena politik Indonesia.

Dominasi Bidang Ekonomi

Sekitar awal tahun lima puluhan, perekonomian Indonesia sebagian masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Belanda yang besar dan terkenal dengan julukan *The Big Five*. Pada tempat ke dua dididuduki oleh pedagang-pedagang perantara nonpribumi keturunan Cina. Perusahaan-perusahaan Belanda tersebut sekitar tahun 1957 dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia, dan sebagian besar dari pengusaha-pengusaha Belanda tersebut kembali ke tanah airnya (Judohusodo, 1985: 69). Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda ini

terjadi bersamaan dengan konfrontasi dengan Belanda mengenai soal Irian Barat (1957-1963), dan terhadap Inggris dalam soal konfrontasi dengan Malaysia. Dalam periode tersebut Oei Tiong Ham *concern* juga mengalami proses nasionalisasi (1963). Secara sosial, politis, dan ekonomis nasionalisasi berarti memberikan peluang kepada pejabat, baik pejabat sipil maupun militer dalam suatu *bureucratic-policy* yang kemudian menikmatinya secara pribadi, terutama pada Zaman Orde Lama kondisi dan situasi tersebut telah menimbulkan semacam sistem *warlordism* (Onghokham, 1990: 26).

Berkuasanya orang-orang Cina dalam bidang ekonomi Indonesia sangat tidak disukai oleh para pengusaha pribumi. Pascakemerdekaan dan dengan tercapainya kekuasaan politik pada tahun 1949, semakin terasa sebagai tidak pantas bahwa kekuasaan di bidang ekonomi berada di tangan kelompok yang dianggap bukan warga negara asli. Perasaan ini semakin nyata dalam apa yang dinamakan *Gerakan Assaat* (Copple, 1994: 81). Gerakan ini dimulai pada Konggres Nasional Seluruh Indonesia pada bulan Maret 1956. Di dalam konggres ini Mr. Assaat mengucapkan pidato yang dengan gigih menuntut agar dalam bidang perekonomian harus ditarik garis yang tegas antara bangsa Indonesia dan warga negara keturunan Cina dan perlakuan serta perlindungan yang khusus harus diberikan kepada golongan pribumi (Tan, 1976: 34).

Sejak tahun 1950, pemerintah menginstruksikan pada bank-bank nasional untuk memberikan kredit khusus kepada para pengusaha dan pedagang pribumi. Dalam tahun itu juga didirikan program *Benteng* yang bertujuan melindungi dan meningkatkan ketrampilan para importir, agar dapat terbina kewiraswastaan yang kokoh dari orang-orang pribumi dan dapat bersaing dengan pengusaha Cina (Suryadinata, 2002: 90). Namun demikian sistem benteng ini hanya menimbulkan kekacauan dan korupsi (Greif, 1991: 13). Para pengusaha Indonesia etnis Cina memprotes terhadap kebijakan ini. Sebaliknya, perkembangan-perkembangan dalam perekonomian Indonesia yang berlawanan dengan harapan pengusaha-pengusaha pribumi justru menimbulkan kekecewaan yang besar, yang kemudian mereka menuntut peraturan-peraturan yang lebih ketat dari pemerintah, bahkan menuntut bahwa diskriminasi tersembunyi yang sudah ada hendaknya dituangkan dalam peraturan yang resmi dan terbuka (Judohusodo, 1985:59). Karena gerakan Assaat yang jelas-jelas berbau rasial yang bertujuan menciptakan kelas wiraswasta asli (pribumi) dengan menggunakan peraturan, tetapi berakhir dengan menjamurnya perusahaan-perusahaan Ali-Baba dengan Ali pribumi, hanya sebagai tameng untuk menyembunyikan "Baba" pengusaha Cina (Greif, 1991: 13). Kebijakan pemerintah ini dibarengi dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, namun posisi dominan orang-orang Cina sulit digeser orang-orang pribumi.

Pengambilalihan perusahaan Belanda oleh pemerintah Indonesia ternyata baru bersifat legal saja, karena ternyata orang-orang yang sebenarnya seharusnya menangani pengelolaannya, kurang pengalaman dan keahlian, dan

karena kurang dipersiapkan, tidak mampu berperan secara baik. Pemerintah ternyata belum siap untuk menyediakan tenaga-tenaga pengelola yang terampil, mengingat pada waktu sebelumnya mereka disibukkan oleh kegiatan-kegiatan politik/militer dalam rangka perjuangan merebut kemerdekaan. Karena orang-orang yang mengelola perusahaan-perusahaan besar tersebut belum ahli dan berpengalaman, maka banyak di antara perusahaan tersebut semakin lemah, bahkan banyak diantaranya yang mundur. Dalam keadaan yang kosong ini, orang-orang nonpribumi keturunan Cina tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan membuat semakin besarnya peranan golongan nonpribumi di bidang ekonomi (Judohusodo, 1985: 69-70).

Orang-orang nonpribumi keturunan Cina dengan cepat menguasai kegiatan ekonomi yang semula dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh karena mereka mempunyai hubungan langsung dengan orang-orang Cina di Hongkong, Singapura, dan mereka tidak mempunyai saingan yang berarti dari perusahaan-perusahaan negara. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 yang melarang orang-orang nonpribumi Cina khususnya WNA bertempat tinggal dan berusaha di desa-desa atau di daerah pedalaman, mereka hanya diperkenankan berusaha terbatas di sekitar ibu kota daerah Tingkat I dan II, telah menyebabkan terpusatnya semua modal mereka di kota-kota yang kemudian membuat kota-kota itu mempunyai kesan bahwa perekonomiannya dikuasai golongan non pribumi (Judohusodo, 1985:70)

Walaupun demikian, kebijakan ekonomi pribumi menyebabkan munculnya beberapa elite pribumi baru pada era Sukarno, terutama orang-orang Sumatra, tetapi jumlah mereka sedikit dan pada umumnya bukan tandingan orang-orang Cina. Dampak kebijakan pribumisasi ekonomi dan demokrasi terpimpin ini terhadap pengusaha Cina adalah tidak muncul usahawan terkemuka Tionghoa yang baru. Hal ini terutama berlaku pada era Sukarno. Bahkan perusahaan Oei Tiong Ham (Kian Gwan) terus merosot sesudah Oei Tiong Ham meninggal pada tahun 1950, dan akhirnya disita oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Alasan penyitaan ini berbelit-belit, tetapi pemerintah menunjuk pada hubungan perusahaan tersebut dengan Belanda sebagai alasan utama. Tampaknya kebijakan demokrasi terpimpin menyulitkan, kalau bukan memustahilkan, munculnya bisnis besar (Suryadinata, 2002:128). Namun demikian, adanya organisasi yang rapi, modal yang banyak, orang-orang nonpribumi cepat menguasai kehidupan ekonomi di kota-kota. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1959 melarang orang-orang nonpribumi keturunan Cina untuk tinggal di desa-desa, perdagangan di desa pun menjadi kosong. Karena tidak ada persiapan mengenai siapa yang menampung kegiatan-kegiatan perdagangan dan distribusi serta mengumpulkan barang di desa, akhirnya semuanya dikuasai kembali oleh orang Cina (Judohusodo,1985:70).

Di Kabupaten Situbondo, orang-orang Cina mayoritas hidup dari usaha perdagangan. Memang sebagian besar mereka tinggal dan membuka usaha di Pecinan yang sejak dulu hingga sekarang

disebut Jalan Irian Jaya. Namun banyak juga orang-orang Cina yang tinggal di pinggiran kota seperti di daerah pantai yaitu di Desa Kalbut. Mereka berkecimpung dalam berbagai sektor ekonomi yaitu perdagangan, pelayanan dan jasa, serta perikanan. Mereka bisa dikatakan memegang kunci ekonomi, tetapi tampaknya hanya di sektor perdagangan, sebab di sektor lain misalnya pertanian dan perikanan dikuasai oleh orang-orang pribumi. Apabila dilihat berdasarkan stratifikasi ekonomi, orang-orang Cina di Situbondo tergolong dalam stratifikasi ekonomi tingkat menengah ke bawah, sebab mereka hanya menguasai perdagangan eceran dan perdagangan koleksi. Kalau pun pada waktu itu di Situbondo ada pabrik milik orang Cina, hanya ada satu pabrik kertas rokok, yaitu Pabrik Kertas Rokok Cap Bapak Jenggot yang berlokasi di Jalan Irian Barat.

Bisa dikatakan bahwa orang-orang Cina pada waktu itu mendominasi bidang ekonomi kota, namun bukan berarti mereka semuanya orang kaya. Mereka terbagi dalam tiga kategori, yaitu kaya, menengah, dan bawah. Orang-orang Cina yang digolongkan kaya jumlahnya paling sedikit dibandingkan dengan golongan menengah, sedangkan golongan menengah lebih banyak dibanding dengan golongan ekonomi kelas bawah. Kondisi ini diketahui oleh masyarakat pribumi dan masyarakat pribumi memandang biasa-biasa saja kondisi semacam ini, sehingga sebelum tahun 1967 tidak pernah ada gejolak sosial yang dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi, atau pertentangan antara kaya dengan miskin, sehingga teori tentang dominasi ekonomi oleh orang-orang Cina di Situbondo sebagai faktor penyebab meletusnya kerusuhan anti-Cina tahun 1967 masih perlu adanya penelitian lebih lanjut.

Hubungan antara Keturunan Cina dengan Pribumi.

Segala usaha yang telah dan akan dilakukan dalam usaha pembauran haruslah memakai wawasan nusantara sebagai landasan berfikir, yaitu wawasan (pandangan, keyakinan) yang memandang rakyat, bangsa, negara, dan wilayah nusantara (darat, laut, dan udara) sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Wawasan ini memperkuat rasa kekeluargaan dan kebersamaan dalam persatuan. Wawasan ini juga menjelaskan makna Bhineka Tunggal Ika. Maksud dan tujuannya adalah pembentukan kesatuan sosial budaya bangsa, yang berarti bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang sesuai dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa (Judohusodo, 1985: 72).

Kesatuan sosial budaya berarti pula bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya seluruhnya yang hasil-hasilnya harus dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Usaha-usaha pembauran bangsa bertujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa. Usaha-usaha pembauran bermasud membentuk satu

bangsa Indonesia yang besar, bersatu secara bulat dan utuh. Dalam hubungan dengan masyarakat keturunan Cina di Indonesia, usaha pembauran yang dilakukan juga mempunyai maksud dan tujuan seperti yang telah dilukiskan di atas, yaitu melarutnya masyarakat keturunan Cina ke dalam kesatuan bangsa yang utuh, bangsa Indonesia yang telah ada. Masyarakat keturunan Cina di Indonesia diharapkan dapat merasakan dirinya adalah bangsa Indonesia, dan di lain pihak masyarakat pribumi merasakan masyarakat keturunan Cina sebagai sesama bangsa, seperti halnya perasaan kebangsaan yang telah ada dari masyarakat yang berasal dari Jawa Barat, Sumatera Utara, Irian, dan lain-lain dalam kesatuan bangsa Indonesia. Setiap orang keturunan Cina sebaiknya larut di dalam lingkungan tempat tinggalnya. Larutnya ini juga ikut mewarnai perkembangan lingkungannya ke arah yang positif (Judohusodo, 1985:73).

Masyarakat pribumi pada dasarnya termasuk masyarakat Timur yang toleran, yang mudah menerima kelompok masyarakat ras lain, terbukti bahwa jarang terjadi ketegangan antara kelompok masyarakat Indonesia dengan kelompok masyarakat keturunan ras Arab, Eropa dan lain-lain, tetapi tidak demikian dengan kelompok keturunan ras Cina. Ketegangan demi ketegangan, pertentangan demi pertentangan, baik terbuka atau pun terselubung sering dan mudah sekali timbul. Masalah utama timbulnya hal tersebut antara lain karena banyak di antara kelompok ras Cina yang masih merasa dirinya lebih dari kelompok ras pribumi. Karena itu, kelompok Cina sejak zaman Belanda hingga saat itu (1967) sebagian besar hidup terpisah, menjaga jarak, dan membentuk garis pemisah dengan masyarakat pribumi.

Kelompok ras Cina adalah emigran (pendatang). Mereka berasal dari berbagai daerah yang berbeda, Ada beberapa suku bangsa yang migrasi ke Indonesia, terutama ke Jawa. Suku bangsa Hokkien berasal dari sebelah selatan Propinsi Fukkien. Suku lain adalah suku Kwang Fu. Mereka berasal dari Kanton dan Macao (Winarni, 2004:185; Vasanty, 1980). Di Indonesia biasanya mereka hidup berkelompok dengan sesama suku dalam suatu pemukiman khusus. Pengelompokan pemukiman masyarakat ini menjadikan golongan ini sangat mencolok di mata masyarakat pribumi. Keadaan eksklusif ini menimbulkan keyakinan pandangan golongan pribumi terhadap masyarakat Cina bahwa bagaimanapun kelompok Cina ini sulit diubah, sulit membaur dengan masyarakat sekeliling tempat tinggalnya, dan dengan segala macam coraknya, semangat kelompok, rasa setia terhadap leluhurnya, serta sikap oportunistis, hanya mencari untungnya saja dalam situasi apapun tanpa menghiraukan kesetiaan kepada tempat tinggalnya, tetap tidak akan lapuk oleh waktu, beberapa tahun pun atau beberapa generasi pun lamanya (Judohusodo, 1985:74) Pandangan semacam inilah yang sangat mudah menyulut kebencian masyarakat pribumi terhadap masyarakat Cina, sehingga sangat mudah dimengerti jika pada waktu terjadi gejolak-gejolak sosial, politik, dan ekonomi, kelompok ras Cina sering menjadi sasaran tindakan kekerasan dari kelompok pribumi, sebagai cetusan ketidakpuasannya.

Di Situbondo sebenarnya orang-

orang Cina diterima dengan tangan terbuka oleh penduduk setempat. Bibit-bibit merenggangnya hubungan pribumi dengan warga keturunan Cina ini mulai muncul di Situbondo ketika Belanda membuat kebijakan yang diskriminatif sekitar tahun 1935. Meskipun Pemerintah Kolonial Belanda membagi penduduk Situbondo menjadi tiga kategori yaitu Eropa, Timur Asing, yang termasuk di dalamnya adalah warga keturunan Cina, Arab dan India, mereka mendapat banyak kemudahan dalam birokrasi kolonial, terutama kemudahan untuk menguasai dan membeli tanah milik orang-orang pribumi. Anak-anak keturunan Cina bersekolah di sekolah khusus yang berbahasa pengantar bahasa Belanda, *Chinese Lagere School*. Banyak warga keturunan Cina yang beragama Kristen memperoleh status disamakan dengan hak-hak Belanda yang disebut *gelijgestelden,* tetapi keadaan ini tidak mutlak dipatuhi oleh orang-orang Cina Situbondo. Seperti dituturkan oleh Go Tjhuwing, seorang mantan guru sekolah Cina di Situbondo, pada awal abad XX sudah ada orang-orang Cina yang baru datang dari daratan Cina langsung menikah dengan orang Madura, termasuk orangtua dari informan ini. Otomatis, mereka dan anak-anak mereka tidak hanya bergaul dengan orang Cina, tetapi juga dengan penduduk pribumi saudara-saudara ibu mereka. Mereka berbicara dengan bahasa Melayu dan bahasa Madura. Demikian juga dengan orang-orang Cina yang tinggal di Pecinan. Mereka tidak terisolasi secara mutlak karena dalam keseharian mereka tetap bergaul dengan orang-orang pribumi baik dengan pembeli, pekerja-pekerja mereka kalau punya dan juga dengan partner dagang pribumi mereka.

Dalam berkomunikasi sehari-hari mereka tidak menggunakan bahasa Cina secara mutlak. Mereka menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia dan Madura. Kalau pun ada yang menggunakan bahasa Cina, itu hanya terbatas dalam lingkungan mereka sendiri. Bahkan di sekolah Cina seperti dituturkan oleh Go Tjhuwing, mereka diwajibkan berbicara dengan bahasa Cina dan didenda apabila ketahuan tidak menggunakannya, tetapi murid-murid di Sekolah Cina tersebut masih dengan mencuri-curi menggunakan bahasa lokal (Madura) sebagai alat komunikasi.

Di Situbondo khususnya di Besuki ada kelenteng tempat peribadatan orang-orang Cina yang beragama Kong Hu Cu. Ini menandakan bahwa di Situbondo banyak pemeluk agama Kong Hu Cu, tetapi sebagian ada yang memeluk agama Katholik dan Protestan, bahkan ada yang memeluk Islam. Berdasarkan kenyataan ini, dapat dikatakan bahwa teori eksklusivisme masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan riset yang pernah dilakukan tim peneliti dari Fakultas Sastra, Universitas Jember di masjid yang ada di sebelah Barat Alun-alun Situbondo salah satu imamnya yang dimakamkan di belakang masjid adalah seorang Cina.

KRONOLOGI PERISTIWA

Meletusnya peristiwa percobaan kudeta 1 Oktober 1965, secara tidak langsung memengaruhi peta politik Cina peranakan Indonesia. Organisasi-organisasi politik yang lebih kecil, seperti Baperki dan LPKB, jalan yang paling

bijaksana dalam menghadapi suasana kemelut seperti itu adalah menunggu sampai pelindungnya masing-masing, PKI dan Angkatan Darat, menyatakan sikapnya (Coppel, 1994:112-121).

Bergeraknya Angkatan Darat yang mulai melakukan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI, baik di tingkat pusat maupun daerah, di bawah instruksi Jenderal Suharto, memberikan dorongan kuat bagi LPKB untuk menyatakan sikap. LPKB mulai berani melncarkan kampanye anti-Komunis dan mengutuk Gerakan 30 September. Golongan ini pun mengkampanyekan pembubaran Baperki dan penutupan sekolah-sekolah yang ada di bawah Baperki. Sejak bulan Oktober hingga Desember 1965 dilaporkan cabang-cabang Baperki yang ada di daerah-daerah telah membubarkan diri (Coppel, 1994:121)

Dalam kurun waktu 1966-1967, pemerintah pusat sendiri tidak bersatu pendapat mengenai permasalahan Cina. Sekalipun tampak mungkin berbicara mengenai kristalisasi kebijakan secara bertahap di tingkat pusat ketika bentuk pemerintahan Orde Baru yang sedang tumbuh semakin jelas, kemunculan kebijakan dan prakarsa yang dijalankan di tingkat daerah bisa bertentangan dengan kebijakan pusat. Dalam kaitan inilah daerah Jawa Timur selama kurun waktu perempat awal 1967 dan sebulan kemudian mengalami gejolak yang mengejutkan publik (Suryadinata, 1994:190-197**).** Pascapercobaan kudeta, kekecewaan orang-orang Cina peranakan yang selama ini terpendam atas kebijakan pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 9/1960) mulai muncul ke permukaan. Kekecewaan ini banyak didasarkan atas semakin ketatnya peraturan tersebut, khususnya di Jawa Timur. Manifestasi kekecewaan orang-orang Cina dimunculkan dalam bentuk demonstrasi. Demonstrasi awal yang dilakukan orang-orang Cina dimulai tanggal 3 Maret 1967 di Kediri ketika seribu orang di antara mereka bergerak dalam barisan-barisan menuju pos polisi untuk menuntut pembebasan 33 orang Cina yang telah ditahan. Demonstrasi ini kemudian berlanjut pada tanggal 11 Maret 1967 ketika sekitar 4.000 sampai 10.000 orang Cina ikut serta dalam arak-arakan penguburan di Malang. Demonstrasi-demonstrasi selanjutnya dilakukan dalam waktu hampir bersamaan di Pasuruan dan Probolinggo. Dalam minggu pertama bulan April, demonstrasi-demonstrasi meluas ke Bondowoso dan Situbondo. Di Situbondo beberapa hari kemudian polanya sama, yaitu perlawanan oleh pedagang Cina terhadap penutupan toko mereka, penahanan demonstrasi oleh orang-orang Cina ini (termasuk beberapa WNI keturunan Cina) di Kantor Komandan Militer setempat. Orang Cina itu mendesak untuk masuk ke kantor guna menemui komandan dan pengawal kemudian melepaskan tembakan ke arah mereka, menewaskan satu orang dan melukai beberapa orang lainnya. Suatu laporan menyebutkan bahwa orang Cina pada saat itu berteriak “Anda mesti tahu bahwa 700 juta rakyat Cina dan kaum Cina perantauan yang dipersenjatai dengan pikiran-pikiran Mao Tse Tung tidak bisa dihinakan, utang darah harus dibayar, pembalasan pasti akan datang.”

Beberapa hari kemudian, terjadi huru-hara anti-Cina yang hebat di Situbondo, Panarukan, dan Besuki.

Beribu-ribu pemuda Indonesia, yang dipimpin oleh para anggota *front* aksi, membakar sebuah pabrik milik orang Cina yaitu pabrik kertas rokok yang bermerek Bapak Jenggot yang terletak di Jalan Irian, menjarah toko dan rumah, dan melemparkan perabotan rumah dan kendaraan, termasuk sekuter, sepeda motor, dan sepeda ke api unggun. Babi yang dibakar lebih dari seratus. Setiap orang Cina yang mereka temui, apa pun kewarganegaraannya, dipukuli, termasuk beberapa orang yang memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang ditembak oleh barisan pengawal di Situbondo pada tanggal 6 April. Kejadian terparah adalah di daerah pecinan, di Jalan Irian Barat.

Menurut penuturan Bapak Haji Damanhuri Mustajabah, seorang bekas anggota Pemuda Marhaenis, kerusuhan itu dipelopori oleh pemuda Indonesia di antaranya Pemuda Ansor, KAPPI, KAMMI yang dipelopori oleh Front Aksi. Namun, menurut pengamatannya, pemuda yang tergabung dalam Front Aksi yang berasal dari Situbondo sendiri jumlahnya sedikit sekali. Menurut saksi mata yang lain, para pemuda tersebut tidak banyak yang mereka kenal, sehingga dapat diduga bahwa para pemuda yang jumlahnya ribuan tersebut berasal dari luar Situbondo. Hal ini dapat dimaklumi sebab kerusuhan anti-Cina di Situbondo tahun 1967 bukan satu-satunya kerusuhan di Jawa Timur, tetapi merupakan rangkaian peristiwa yang beruntun terjadi mulai dari Kediri, Surabaya, Malang, Probolonggo, Pasuruan, Bondowoso, dan Situbondo adalah yang terakhir. Dengan begitu, ada kemungkinan para pemuda tersebut didatangkan oleh Front Aksi Situbondo dari daerah luar Situbondo.

DAMPAK KERUSUHAN ANTI-CINA

Peristiwa yang sangat mengejutkan ini, karena sebelumnya tidak pernah terjadi, menyebabkan orang-orang Cina menjadi sangat ketakutan. Mereka merasa keamanannya terancam. Sampai beberapa hari mereka tidak berani keluar rumah dan tidak berani beraktivitas, sebab seperti dikatakan oleh seorang informan, Ibu Sucipto (55 tahun), bahwa api unggun bekas pembakaran perabotan rumah tangga milik orang-orang Cina itu seminggu baru padam.

Akibat lebih lanjut adalah karena orang-orang Cina tidak berani barktivitas dan mereka menutup toko-toko mereka, ekonomi kota dapat dikatakan lumpuh, terbukti dengan untuk membeli baterai saja bingung karena tidak ada toko yang berani buka. Baru seminggu kemudian, setelah para pemuda bekerja bakti membersihkan bekas pembakaran perabot rumah tangga dan kerusakan yang lain, orang-orang Cina baru berani beraktivitas lagi karena mereka merasa bahwa para pemuda Situbondo dan penduduk pribumi lainnya tidak semuanya membenci mereka.

Apabila di tempat lain, di Makassar pascaperistiwa G 30 S PKI tahun 1965 misalnya, menyebabkan semakin renggangnya hubungan antara orang-orang Cina dengan penduduk pribumi (Hendratmoko,1998), tidak demikian halnya di Situbondo. Menurut beberapa informan, di antaranya Bapak Sutjipto (57 tahun), pascakerusuhan tahun 1967 hubungan antara orang–orang Cina dengan penduduk pribumi biasa-biasa saja. Bahkan, dengan berjalannya waktu karena semakin terintegrasinya

masyarakat Cina ke dalam masyarakat pribumi, pada saat sekarang ini orang-orang Cina Situbondo mayoritas hidup berdasarkan budaya dan tradisi lokal. Mereka berbicara dengan bahasa Indonesia dan Madura. Bahkan, mereka yang sudah lanjut usia yang dulunya sering berbahasa Cina, saat ini mereka mengaku sudah banyak yang lupa. Banyak diantara mereka yang beragama Katolik, Protestan, dan Islam. Bahkan juga banyak yang kawin dengan penduduk pribumi.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: kerusuhan anti-Cina di Situbondo tahun 1967 tidak disebabkan oleh renggangnya hubungan antara orang-orang Cina dengan pribumi, karena sebelum terjadinya kerusuhan anti-Cina tahun 1967, hubungan antara orang-orang Cina biasa-biasa saja, bahkan dapat dikatakan baik. Terbukti sebelum tahun 1967 tidak pernah ternah terjadi konflik-konflik yang berarti antara orang-orang Cina dengan penduduk pribumi. Teori tentang dominasi ekonomi kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena meskipun sektor ekonomi kota dikuasai oleh orang-orang Cina, penduduk pribumi memandang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, karena kedua teori tersebut tidak sesuai dengan realitas, penulis menyimpulkan bahwa kerusuhan anti Cina di Situbondo tahun 1967 lebih disebabkan oleh kondisi politik nasional pada waktu itu. Pemerintah yang baru (Orde Baru) pada waktu itu belum berhasil penuh dalam mengembalikan stabilitas keamanan dan ketertiban, stabilitas politik dan ekonomi, dan adanya kekhawatiran dari kelompok tertentu, terutama militerm, akan terjadinya bentrokan massa antara pendukung fanatik Soekarno di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan pendukung Orde Baru yang *notabene* adalah kelompok beraliran kanan, sehingga dilakukan rekayasa politik dengan mencari kambing hitam sebagi penyebab kekacauan ekonomi, terutama di Jawa Timur yang paling parah, dan orang-orang Cinalah yang menjadi sasaran..

DAFTAR PUSTAKA

Coppel, Charles, A. 1994. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta: PT. Pustaka Aset

Judohusodo, Siswono. 1985. *Warga Baru: Kasus Cina di Indonesia. Jakarta:* Lembaga Pener-bitan Yayasan Padamu Negri

Nawiyanto, S. 2001. "*Agricultural Development in a Frontier Region of Java: Besuki Residency, 1870 early 1990s." Thesis*. Sydney: The Australian National University.

Suryadinata, Leo. 1994. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Yasin, Ali. 2003. "*Radikalisasi Petani Banongan Situbondo Tahun 1992-1996 (Studi Konflik Tanah Eks Hak erfpacht Antara Petani denga Perusakan Daerah Banongan." Skripsi.* Jember: Jurusan Sejarah Universitas Jember

Zein, Abdul Kadir. 2000. *Etnis Cina dalam Potret Pembauran di Indonesia.* Jakarta: Prestasi Insan Indonesia